

# Gagasan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda (Sebuah Kajian Literatur)

<sup>1</sup>Mirza Hardian, <sup>2</sup>Yayuk Hidayah, <sup>3</sup>Anis Suryaningsih, <sup>4</sup>Yoga Ardian Feriandi

<sup>1</sup>Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan  
Kota Pekanbaru, Riau Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Ahmad Dahlan

1. Kapas No.9, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta  
Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami No.36, Kientingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta  
Jawa Tengah Indonesia

<sup>4</sup>Universitas PGRI Madiun

Jl. Setia Budi No.85, Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun  
Jawa Timur Indonesia

Email: <sup>1</sup>mirzahardian@gmail.com, <sup>2</sup>yayuk.hidayah@pgsd.uad.ac.id  
<sup>3</sup>anissuryaningsih@staff.uns.ac.id, <sup>4</sup>yogaardianferiandi@unipma.ac.id

---

#### Tersedia Online di

<http://www.jurnal.unublitar.ac.id/index.php/briliant>

---

#### Sejarah Artikel

Diterima pada Maret 2021  
Disetujui pada Agustus 2021  
Dipublikasikan pada Agustus 2021  
Hal. 552-567

---

#### Kata Kunci:

pendidikan politik; Indonesia;  
warga negara muda

---

#### DOI:

<http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v6i3.653>

---

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah memberikan gagasan mengenai konsep pendidikan politik bagi warga negara muda dalam konteks Indonesia. Hal ini muncul dari adanya permasalahan menurunnya kepedulian aspek politik pada warga negara muda yang menjadi tantangan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Metode penelitian menggunakan *library research*. Data kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal nasional dan internasional, majalah, hasil penelitian, laporan penelitian dan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan politik bagi generasi muda baik dalam bentuk *online* dan *offline*. Setelah melakukan kajian, peneliti menemukan bahwa konsep pendidikan politik bagi warga negara muda dalam konteks Indonesia setidaknya menggunakan dua acara yaitu: 1) pendidikan politik bagi warga negara muda dalam konteks Indonesia harus memperhatikan beberapa dimensi pendidikan politik yaitu kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan politik, afektif yang berhubungan dengan pembentukan karakter dan aspek psikomotor yang berhubungan dengan kecakapan baik berupa intelektual maupun partisipatoris. 2) Konten pendidikan politik dalam konteks Indonesia adalah

demokrasi, budaya politik Pancasila dan isu global. Kesimpulan penelitian ini adalah Pendidikan politik merupakan upaya yang sistematis dan keberlanjutan. Gagasan mengenai konsep pendidikan politik bagi warga negara muda dalam konteks Indonesia merupakan usaha dalam menjawab tantangan tentang ke apatisan warga negara muda terhadap politik.

## PENDAHULUAN

Kendala yang dihadapi oleh sebagian besar negara berkembang dengan menggunakan demokrasi dalam model penyelenggaraan pemerintahan adalah keterlibatan warga negara untuk melaksanakan proses demokrasi yang ideal. Dalam hal ini Molokwane & Muhiya tshombe (2018) menyatakan bahwa pentingnya keterlibatan warga dalam proses perumusan kebijakan berakar di antara lain, fakta bahwa output dan efek kebijakan publik mempengaruhi mereka yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Pernyataan serupa juga di sampaikan oleh Michels & Graaf (2010) bahwa partisipasi warga dipandang sebagai aspek vital dalam demokrasi dan memiliki efek positif pada kualitas demokrasi. Oleh karena itu, keterlibatan warga negara yang dimaksud bukan hanya dalam memberikan hak suara (*voting*) dalam pemilihan umum, namun adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan umum dari pemerintah dimulai dari proses *input* sampai pada tahap *output*. Hal demikian bermakna bahwa konsep keterlibatan warga negara yang dimaksud didasari atas kesadaran moral sebagai bentuk loyalitas warga terhadap negaranya.

Pendidikan adalah salah satu sarana yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, karakter dan keterampilan individu yang diatur dalam satuan kurikulum yang terintegrasi untuk mencapai kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan secara nasional. Hudha et al (2019) mengemukakan bahwa kurangnya keterampilan pada siswa merupakan masalah yang kompleksitas pada sebagian sekolah. Kemudian McMahan (2004) menyatakan bahwa manfaat sosial dari pendidikan adalah eksternalitas pendidikan yang melimpahkan keuntungan bagi orang lain di masyarakat termasuk generasi mendatang. Lebih lanjut dalam hal pendidikan, kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan McDougald (2018) menyatakan bahwa ada banyak variabel yang harus dipertimbangkan ketika merancang kurikulum terutama dalam hal konten. Kurikulum dalam pendidikan harus senantiasa menyesuaikan dengan perubahan sosial masyarakat yang sebagian besar dipengaruhi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Aydin, Ozfidan, & Carothers (2017) bahwa tantangan dan hambatan yang spesifik harus dikembangkan untuk pendidik dalam pembuatan kebijakan agar membantu dalam memenuhi setiap tantangan terutama dalam penggunaan teknologi mempersiapkan siswa siap untuk dapat menggunakan teknologi.

Kurikulum sebagai bagian penting dari pendidikan juga berperan sebagai instrumen untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagaimana yang diungkapkan St. John-Matthews, Robinson, Martin, Newton, & Grant (2020) yang menyatakan bahwa desain kurikulum merupakan aspek penting dari pendidikan termasuk siswa yang secara signifikan dapat mempengaruhi hasil yang di harapkan oleh kurikulum. Dalam hal mengembangkan kemampuan siswa, kurikulum juga di harapkan mampu mengembangkan kemampuan kognitif siswa untuk menjadi panduan warga negara dalam memahami setiap informasi yang sangat kompleks. Dalam hal ini Hysing (2015) menyatakan bahwa dilema utama dalam perencanaan bagaimana memungkinkan perubahan untuk keberlanjutan jangka panjang adalah legitimasi politik dan proses demokrasi.

Kemampuan kognitif siswa untuk dapat memahami perannya sebagai warga negara adalah termasuk dalam memahami seperti memahami isu sosial yang sedang berkembang, memahami hak dan kewajiban serta peran individu sebagai bagian dari warga negara termasuk dalam konteks Indonesia. Bagian terpenting dari pendidikan adalah untuk mempersiapkan individu untuk menjadi warga negara yang baik (*good citizen*). Wahab & Sapriya (2011) berpendapat bahwa warga negara yang adalah yang mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan sosial negara kemudian Karliani, Kartadinata, Winataputra, & Komalasari (2019) mengemukakan bahwa warga negara yang baik dapat diawali dengan keterlibatan dengan berbasis nilai sosial. Konsep warga negara yang baik merupakan kompetensi yang ingin dicapai (*civic competence*) setelah melaksanakan proses pendidikan formal. Peran pendidikan dalam mengembangkan kemampuan intelegensi warga negara mempunyai hubungan yang positif terhadap pembentukan *mindset* dan keterampilan warga negara muda (pelajar), sehingga pendidikan merupakan bagian dari proses terbentuknya *human capital* yang berperan untuk warga negara muda dalam melakukan analisis dan klarifikasi terhadap informasi secara holistik sebagai dasar untuk membentuk kebiasaan berpikir kritis.

Berdasarkan pasal 37 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang wajib ada dalam kurikulum mulai dari kurikulum pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Pada sistem pendidikan nasional Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraann berperan untuk menanamkan sikap nasionalisme dan patriotisme secara luas dengan memperhatikan konteks lingkungan sosial masyarakat Indonesia yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan formal. Somantri (2001) menjelaskan bahwa dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah berinti pada demokrasi pendidikan yang mempersiapkan siswa agar dapat hidup sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan satu satunya pelajaran di setiap level pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan pemahaman pada individu terhadap tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang diiringi dengan proses diseminasi ideologi secara praktis yang nantinya berperan sebagai katalisator upaya menyelesaikan masalah sosial di masyarakat dengan pendekatan Keindonesiaan melalui proses pembelajaran dengan berbagai pendekatan dengan output berupa terbentuknya kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*). Berkaitan dengan hal tersebut, Bronson (1999) menjelaskan bahwa dalam Pendidikan kewarganegaraan keterampilan yang perlu dikembangkan adalah *civic eknowledge, civic skills dan civic disposition*

Pendidikan politik tidak dapat dipisahkan dari Pendidikan kewarganegaraan. Partai politik melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik mempunyai fungsi untuk melaksanakan pendidikan politik yang berpusat pada kader partai dan masyarakat dengan penekanan konten pada hak dan kewajiban warga negara dalam membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik sangat rentan terhadap *conflict of interest* yang dipengaruhi oleh kepentingan partai politik itu sendiri. Disisi lain pelaksanaan pendidikan politik di

Indonesia sebagian besar dilaksanakan oleh partai politik hanya bersifat sporadis pada saat menjelang pemilihan umum baik di level nasional ataupun daerah. Harapan terbesar untuk melaksanakan pendidikan politik secara ideal pada saat ini dalam ruang lingkup formal hanya dapat dilaksanakan melalui pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan terkhusus untuk warga negara muda. Sekolah pada dasarnya dapat menjadi salah satu wadah untuk meningkatkan kompetensi warga negara muda untuk menyesuaikan dengan budaya demokrasi, membangun kesadaran secara personal dan kolektif tentang kesadaran sebagai warga negara (Nilgun, Mehmet, & Burcu, 2015) untuk mendapatkan salah satu hak yang paling mendasar yaitu hak politik dengan berorientasi untuk menciptakan tatanan kehidupan demokrasi yang beradab.

Peneliti berpandangan bahwa terdapat kebutuhan yang mendesak tentang model pendidikan politik bagi generasi muda di Indonesia. Oleh karena itu, fokus kajian pada penelitian ini adalah bagaimana model pendidikan politik bagi generasi muda terutama pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Urgensi penelitian didasarkan pada adanya kebutuhan terhadap pendidikan politik bagi generasi muda Indonesia dalam konteks revolusi industri. Revolusi industri adalah kondisi dimana segala aspek kehidupan dipegaruhi oleh kondisi global, dalam perkembangannya konsep tentang revolusi industri adalah menempatkan latar sejarah revolusi industri secara lebih luas (de Vries, 1994) sementara di sisi lain, muncul kebingungan dari adanya revolusi industri terutama dalam mempertahankan jati diri bangsa bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Meskipun dampak revolusi industri secara positif dapat dirasakan bagi masyarakat, namun menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana mengemas revolusi industri dalam bidang pendidikan dapat sealaras dengan fungsi pendidikan yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Beberapa penelitian terdahulu meneliti tentang pendidikan politik antara lain. Mirshak (2019) Mengeksplorasi pendidikan politik di organisasi masyarakat sipil (OMS) di Mesir pasca pemberontakan yang menghasilkan bahwa OMS mampu mengadaptasi metode pendidikan yang dapat berfungsi sebagai cara bertahan hidup dan mendidik dalam konteks otoriter. Zvulun & Harel (2018) yang menekankan pada instrumen pendidikan tambahan di sekolah yang dapat berkontribusi pada kesadaran, partisipasi dan keterlibatan politik siswa. Dengan melakukan wawancara terhadap 20 guru dari ilmu sosial dan studi kewarganegaraan, Artikel ini memberikan pemahaman bahwa tambahan bahwa dengan menambahkan teori pembelajaran (politik) akan dapat memberikan orientasi kewarganegaraan di sekolah menengah yang akhirnya dapat meningkatkan keterlibatan warga negara. Hartney & Flavin (2013) menyelidiki fondasi politik dari "kesenjangan prestasi" dalam pendidikan Amerika. Dari sisi kesiapan sekolah di era global, Walker (2016) mengkaji tentang pemahaman sistem sekolah yang sedang dipersiapkan dalam konteks global di Singapura. Penelitian ini mengfokuskan pada tiga faktor yaitu tujuan pendidikan inklusif, kebijakan inklusif, pemahaman tentang sejarah negara Singapura dalam konteks pendidikan ganda. Zavala & Henning (2017) mengeksplorasi pembentukan pendidikan politik akar rumput dan bagaimana hal itu memediasi pengembangan guru sebagai

pengorganisasi masyarakat. Hasil dari penelitian kualitatif selama 3 tahun dalam organisasi aktivis akar rumput ini adalah pendidikan politik harus dipahami bahwa "guru sebagai pengorganisir masyarakat"

Terdapat beberapa keterbaruan kajian yang peneliti lakukan yaitu *pertama*, pada aspek kajian peneliti mengfokuskan pada kebutuhan pendidikan politik bagi generasi muda di Indonesia dengan menghususkan pada jenjang SMA atau sederajat di era revolusi industri. *Kedua*, Kebutuhan pendidikan politik yang peneliti usung adalah dengan menghadapkan pada konteks global yaitu revolusi industri namun dengan tidak menghilangkan jati diri Indonesia sebagai negara yang demokrasi. Permasalahan yang menjadi dasar dalam kajian ini adalah pentingnya pendidikan politik yang bernuansa global bagi generasi muda terutama pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana model pendidikan politik bagi generasi muda terutama pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di era revolusi industri?". Secara umum penelitian bertujuan untuk menemukan, menggali model pendidikan politik bagi generasi muda terutama pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di era revolusi industri. Sementara manfaat penelitian secara teoretis adalah diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi ladsan teori bagi kajian selanjutnya yang serupa. Variable dalam penelitian ini adalah pendidikan politik, generasi muda dan revolusi industri.

## **METODE**

Metode yang peneliti gunakan adala deskriptif kualitatif kritis dengan studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif yang dimaksudkan merupakan jenis penelitian yang bukan berupa hasil dalam bentuk angka (Gunawan, 2013) sementara kualitatif kritis yaitu dengan menekankan analisis pada sumber data yang di peroleh selama penelitian. Jenis penelitian kualitatif yang peneliti gunakan bersifat kepustakaan yaitu perolehan data melalui buku dan sumber kepustakaan lainnya (Hadi, 1995). Data kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal nasional dan internasional, majalah, hasil penelitian, laporan penelitian dan kepustaakn lainnya yang berkaitan dengan pendidikan politik bagi generasi muda baik dalam bentuk *online* dan *online*. Sumber yang diperoleh dari buku kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan tesis dan anti tesis (Soejono & Abdurrahman, 1999).

Analisis data menggunakan tiga (3) tehnik, pertama analisis deskriptif berupa pengumpulan data kemudian melakukan analisis (Surachman, 1990). Kedua analisis konten, Hostli memberikan pendapat bahwa analisis konten merupakan upaya penarikan kesimpulan melalui pencarian pesan secara objektif dan sistematis (Moleong., 2000). Ketiga, analisis kritis, pandangana kritis menekankan pada penafsiran dalam menyelami teks dan menangkap makna dibaliknya (Eriyanto, 2008).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dimensi pendidikan politik**

Konsep pendidikan politik dalam konteks Indonesia adalah mengacu pada beberapa dimensi pendidikan politik yaitu kognitif , afektif dan psikomotor.

Pendidikan politik bagi pelajar SMA di Indonesia pada hakikatnya adalah tentang membelajarkan agar menjadi warga negara yang baik bagi Indonesia. Dalam hal ini Hidayah, Suyitno, & Retnasari (2019) berpendapat bahwa jika dibandingkan, pada jenjang Sekolah Dasar karakteristik perkembangannya menampilkan perbedaan karena pada usia ini berada ada tahap perkembangan. Sementara pendidikan politik bagi pelajar SMA harus turut serta memperhatikan perkembangan usia SMA. Sehubungan dengan hal tersebut, Arma & Agus (1994) menyatakan bahwa psikomotoris usia SMA ditandai dengan perubahan jasmani dan fisiologi. Dalam era globalisasi, pendidikan politik bagi pelajar SMA dengan memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor diharapkan dapat menambah pengetahuan mereka sebagai generasi bangsa sehingga dapat menjadikan Indonesia dapat lebih baik dibidang politik mendatang. Halking (2018) menjelaskan jika dimensi pendidikan politik bagi pelajar SMA di Indonesia diselaraskan dengan aspek-aspek pendidikan yang memperhatikan beberapa aspek baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.

Pendidikan di Indonesia dapat menunjang dalam pencapaian tujuan dan berdampak positif di era globalisasi (Nurkholis, 2013). Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran yang mencoba memahami tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebagai dimensi sosial, Pendidikan adalah unsur yang berpengaruh dalam pengembangan sosial (Maemonah, 2012). Demikian dalam ranah pendidikan politik, diperlukan usaha yang sadar dan terencana untuk dapat mentransformasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara terutama di negara demokrasi seperti Indonesia. Ciri-ciri warga negara yang baik antara lain bersikap mandiri, disiplin, tanggung jawab, bersikap nasionalisme, patriotisme saling menghormati dan memiliki ketahanan pribadi (Raharjo, 2017)

Konsep pendidikan politik bagi warga negara muda dalam konteks Indonesia pada dimensi kognitif yaitu yang berhubungan dengan pengetahuan politik. Dalam hal ini, Pastarmadzheva (2015) menyatakan bahwa pengetahuan politik adalah konsep kunci dalam teori budaya politik. Budaya politik mencerminkan nilai-nilai politik dalam masyarakat, memodifikasi sistem politik dan dimodifikasi oleh yang terakhir. Elemen budaya politik yang mendefinisikan nilai-nilai dan perilaku sipil dan merupakan objek yang dapat didefinisikan adalah pengetahuan politik. Pada era digital ini, pengetahuan politik bagi warga negara bermanfaat agar dapat menggabungkan ide gagasannya tentang politik di pusran informasi yang berlimpah sehingga dapat meningkatkan intelektualitasnya dalam bidang politik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Leonhard, Karnowski, & Kümpel (2020) bahwa berita *online* hari ini adalah sumber penting informasi politik dan tersedia dalam jumlah besar, memahami penggunaannya dan pengaruhnya terhadap pengetahuan politik warga sangat penting.

Kleinberg & Lau (2019) berpandangan bahwa Individu dengan pengetahuan politik tinggi menunjukkan perilaku yang berdampak pada demokrasi yang berfungsi dengan baik, termasuk memegang opini politik yang lebih stabil, menunjukkan kendala ideologis yang lebih besar, mengetahui lebih banyak tentang kandidat politik, dan lebih cenderung memilih dengan benar. Dalam konteks Indonesia, maka dapat di hubungkan bahwa pengetahuan politik warga negara yang tepat adalah pengetahuan politik yang mengandung konten Dasar negara (Pancasila) dan UUD 1945. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Setiawan &

Darmawan (2020) bahwa menumbuhkan kesadaran pertahanan nasional termasuk politik bagi masyarakat adalah dengan nilai-nilai yang melekat di setiap masyarakat.

Pengetahuan politik konteks Indonesia dengan menekankan Pancasila dan UUD 1945 menjadi usaha dalam membumikan konstitusi negara pada warga negara terutama di era yang sudah digital saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut Lee & Xenon (2019) menyampaikan bahwa penggunaan media sosial politik tidak memiliki pengaruh terhadap pengetahuan politik, pada sisi lainnya, penggunaan media sosial secara umum memiliki efek negatif terhadap pengetahuan politik. Pengetahuan politik konteks Indonesia adalah pengetahuan dengan nuansa haluan negara. Maka sudah seharusnya konten pendidikan politik juga memperhatikan aspek kognitif ini sebagai bagian yang penting.

Memoli, (2011) menyatakan bahwa dalam teori tradisional demokrasi menetapkan warga negara yang berpengetahuan sebagai elemen penting dalam sistem yang demokratis. Karena alasan ini, pengetahuan politik dipandang sebagai fungsional dan elemen yang tak terpisahkan dari demokrasi yang layak. Berdasarkan hal tersebut maka pengetahuan politik konteks Indonesia pada aspek kognitif adalah selaras dengan usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dengan terbiasa mengenalkan dasar negara pada warga negara sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan bangsa dan negara. hal tersebut sesuai dengan pernyataan Marsudi (2006) bahwa nilai-nilai Pancasila telah di terapkan dalam masyarakat Indonesia sejak berdirinya kerjaan besar di Indonesia.

Selanjutnya, pendidikan politik bagi warga negara muda dalam konteks Indonesia pada dimensi afektif yang berhubungan dengan pembentukan karakter. Peterson (2019) menyatakan bahwa pendidikan karakter terlalu individual dan, sebagai akibatnya, gagal untuk terlibat secara memadai dengan politik. Konsep kompetensi warga negara (*civic competence*) yang diperoleh melalui pendidikan formal pada dasarnya berfungsi untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam penyelenggaraan demokrasi. Kovacs (2009) menyatakan bahwa jika suatu negara tidak mengundang dan mengizinkan individu untuk berpartisipasi dalam kebijakan maka negara tersebut bersifat otoriter, teokratis, totaliter, atau fasis; itu tidak bisa disebut demokratis. Maka dari itu, kendala pelaksanaan demokrasi terbesar yang dihadapi oleh negara berkembang adalah partisipasi warga negara yang berkualitas.

Dimensi afektif yang berhubungan dengan pembentukan karakter dalam politik di Indonesia adalah sikap dan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Ruger (2005) menyatakan bahwa selama beberapa dekade demokrasi memiliki hubungan kompleks dalam struktur politik suatu negara dalam setiap aspek masyarakat. Maka dari itu, konsep partisipasi warga negara yang berkualitas merujuk pada partisipasi warga negara berdasarkan pengetahuan sebagai prasyarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan iklim demokrasi yang sehat. Partisipasi warga negara muda dalam ruang lingkup pendidikan formal dapat ditingkatkan melalui pendidikan politik dengan pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana untuk melahirkan warga negara negara yang aktif (*active citizen*), kritis dan mempunyai pengetahuan yang baik (*well informed*) tentang kewarganegaraan (Print, 2012) dengan titik tekan terhadap penguasaan konsep (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan watak (*disposition*).

Pendidikan politik bagi warga negara muda dalam konteks Indonesia pada dimensi pembentukan karakter adalah usaha dalam menghasilkan warga negara yang baik. Budimansyah & Suryadi (2008) menyatakan bahwa warga negara muda masih membutuhkan bimbingan agar dapat mewujudkan warga negara yang baik. Selain itu, König & Wenzelburger (2020) berpendapat bahwa dalam rangka menghindari dampak negatif mekanisme tata kelola di tingkat input politik, maka pembentukan karakter politik adalah vital. Maka dalam hal pendidikan politik dalam konteks Indonesia akan terdapat berbagai “payung” yang mengarah pada mewujudkan warga negara yang baik.

Wu (2017) menyatakan bahwa lembaga-lembaga politik memainkan peran penting dalam mempengaruhi evolusi karakter. Pembentukan karakter pada pendidikan politik di Indonesia menjadi usaha dalam mengatasi realitas sosial berupa keapatisan warga negara muda terhadap kehidupan politik. Berkaitan dengan hal tersebut, Malihah (2015) berpendapat bahwa di masa depan, warga negara muda yang dapat mengisi pembangunan nasional merupakan yang di harapkan bagi Indonesia. Mewujudkan pendidikan politik bagi warga negara muda dalam konteks Indonesia akan melibatkan tentang karakter, nilai-nilai dan moral sebagai bangsa Indonesia.

Bagian terakhir yaitu pendidikan politik bagi warga negara muda dalam konteks Indonesia pada dimensi psikomotor yang berhubungan dengan kecakapan baik berupa intelektual maupun partisipatoris. Dalam hal ini Ferris et al (2007) menyatakan bahwa keahlian politik adalah suatu konstruk yang diperkenalkan sebagai kompetensi yang diperlukan untuk menjadi efektif dalam organisasi. Keahlian politik menanamkannya kerangka kerja yang mempengaruhi perilaku, multilevel, kerangka meta-teoretis yang mengusulkan bagaimana keterampilan politik beroperasi untuk memberikan efek pada diri dan orang lain dalam organisasi.

Secara umum dimensi psikomotor dalam pembelajaran merupakan bagian yang banyak berkaitan dengan keterampilan. Dalam hal pendidikan politik maka dimensi psikomotor dapat di gambarkan sebagai keterampilan warga negara dalam politik. Munyon, Summers, Thompson, & Ferris (2013) menyatakan bahwa reputasi pribadi dan kemanjuran diri memediasi keterampilan politik dan hubungan kinerja tugas. Kemudian Wang & Hall, (2019) berpendapat jika ketrampilan politik terkait dengan kualitas kehidupan sosial yang dinilai sendiri, kesukaan yang dipersepsikan berdasarkan persepsi, dan sosialitas positif yang dinilai oleh teman. Maka keterampilan politik dapat menentukan bagaimana cara pandang dan sikap warga negara.

Pada warga negara muda terutama jenjang sekolah menengah, keterampilan politik dapat melatih mereka untuk dapat menentukan kontribusinya dalam kehidupan bernegara. Stringer et al (2009) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sikap politik anak dalam masyarakat yang sangat terpecah dan menyarankan guru untuk meningkatkan hubungan anak dengan masyarakat. Keterampilan politik bagi warga negara dapat mengarahkan emosional politik pada hal yang lebih bermanfaat pada struktural keterampilan politik. Dalam hal ini Quintelier (2010) menyatakan bahwa tidak hanya sekolah mempersiapkan siswa untuk dunia 'nyata' tetapi mereka juga menyediakan mereka dengan sumber daya penting yang diperlukan untuk partisipasi politik.



Pendidikan politik bagi warga negara muda dalam konteks Indonesia pada dimensi psikomotor akan dapat membawa pada arah kondisi demokrasi yang ideal di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Witschge, Rözer, & Werfhorst (2019) bahwa selain meningkatkan keterampilan kognitif dan mempersiapkan siswa untuk pasar tenaga kerja, salah satu tugas inti pendidikan adalah mempersiapkan warga negara untuk berpartisipasi dalam demokrasi.

### **Konten pendidikan politik untuk sma dan isu global**

Pendidikan politik bagi warga negara muda Indonesia penting dilakukan, Pacho (2014) menyatakan bahwa banyak mengatur kehidupan manusia. Dalam konteks Indonesia, pendidikan politik penting mengingat fenomena politik yang terjadi di Indonesia. Romadlon (2016) menyatakan bahwa pasca reformasi perpolitikan di Indonesia berubah-ubah. Fenomena politik di Indonesia menampilkan kondisi politik yang tidak sehat namun nyatanya terjadi dimasyarakat. Misalnya beredarnya praktek politik uang yang berjalan dimasyarakat dan dianggap wajar di lingkungan sekitar. Politik hanya dimaknai secara transaksional dalam masyarakat. Berpolitik sebagai salah satu upaya untuk mencapai kekuasaan. Perlu adanya upaya pendidikan politik bagi warga negara muda guna membentuk warga negara muda Indonesia berkarakter dan memiliki kesadaran politik.

Bilgiler, Politik, Öğretimi, kuş, & Tarhan (2016) menyatakan bahwa sistem pendidikan di berbagai negara melibatkan pelajaran atau pelajaran yang bertujuan membawa pengetahuan politik pada siswa. Tujuan pendidikan politik menurut Abdul Mu'iz (2000) yaitu pendidikan yang berusaha menggugah kesadaran politik siswa. Kepribadian politik sebagai respon dinamis, sistematis dan berkesinambungan terhadap suatu fenomena politik yang terjadi di masyarakat. Seorang warga negara muda yang memiliki kepribadian politik mampu memberikan kontribusi dalam kehidupan politik. Oleh karena itu diperluaka suatu pengetahuan, pengalaman dan kecakapan. Lebih lanjut Ferris et al (2007) menyatakan bahwa keterampilan politik menjadi kompetensi yang diperlukan untuk menjadi efektif dalam komunitas. Pengetahuan, pengalaman dan kecakapan yang dikembangkan membentuk wawasan politik politik seorang individu. Wawasan politik ini meliputi pandangan yang komprehensif, wawan yang luas, gagasan yang kritis dan rasa tanggung jawab.

Pada ranah pendidikan, pendidikan politik diinternalisasikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam hal ini, Bilgiler et al (2016) menyatakan bahwa saat ini, pendidikan kewarganegaraan telah menjadi bidang studi yang sangat penting di seluruh dunia. Pendidikan politik, di sisi lain, memiliki dimensi penting lainnya dalam pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian, ada peningkatan pesat dalam jumlah studi tentang pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik. Pendidikan politik terinternalisasi ke dalam materi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Demokrasi, hak Asaasi Manusia dan isu-isu kebangsaan lainnya. Materi ini perlu

dikolaborasikan dengan kemampuan pendidik dalam menyampaikan. Kemampuan pendidik yang baik akan mempengaruhi keberhasilan dalam penyampaian materi.

Bobot penguasaan materi Pendidikan Politik pada setiap jenjang pendidikan memiliki bobot yang berbeda beda. OECD atau Organisation for Economic Co-operation and Development (2018) menyatakan bahwa dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan - didorong oleh globalisasi dan laju perkembangan teknologi yang lebih cepat. Pada pendidikan dasar pengenalan dan pembiasaan terhadap sikap-sikap positif seperti sopan santun, tenggang rasa, ttata krama, kedisiplinan dan lainnya. Pada pendidikan tingkat atas mulai ada penguatan kemampuan analisis yang berkaitan dengan high order thinking skills. Tausan (2013) menyatakan bahwa proyek pendidikan milenium ketiga bertujuan mengubah praktik pendidikan tradisional menjadi praktik berdasarkan prinsip-prinsip baru khusus untuk pendidikan kontemporer dan pedagogi: pendidikan global, seumur hidupbelajar, pendidikan inklusif, pendidikan untuk semua, kesempatan yang sama, kemitraan dalam pendidikan. Hal ini menjadi tantangan bagi pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang tidak hanya penguatan materi namun juga kesadaran untuk berpartisipasi. Peserta didik tercipta suatu pemahaman bahwa politik tidak hanya berkaitan dengan perebutan kekuasaan saja. Disini perlu adanya upaya dari pendidik .

Tantangan pendidikan politik di Indonesia pendidik perlu memiliki kemampuan kompetensi yang baik Kompetensi ini diperlukan oleh seorang guru dalam mengelola kelas agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 mengemukakan kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi intelektual dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik diperlukan guru dalam memahami karakteristik peserta didik. Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan seorang pendidik yang dapat diteladani dalam kehidupan sehingga pendidik bisa menjadi role model dalam pembelajaran. Kompetensi intelektual terkait dengan kemampuan berfikir kritis, sistematis, yang diperlukan guru dalam pendidikan politik dalam mengkritisi fenomena dengan pengetahuan politik dan memilih metode yang sesuai dengan materi pendidikan politik. Kompetensi profesional berkaitan dengan kemampuan dalam merencanakan pembelajaran yang efektif dan pelaksanaan pembelajaran.

Pada pendidikan politik seorang pendidik selain harus menguasai materi juga harus update terhadap isu-isu global. Karaduman (2014) menyatakan bahwa saat ini kita hidup di dunia besar yang berubah hari demi hari di abad ke-21. Ada banyak parameter dari perubahan besar ini yang terhubung langsung. Sebagian besar dari kita dapat menyadari perubahan-perubahan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi bagian terpenting dari kesadaran ini adalah tentang memahami konsekuensi mereka. Materi dan pengetahuan isu global dapat diperoleh melalui sumber bacaan yang relevan seperti buku-buku terbaru, jurnal, peraturan perundang-undangan. Selain melalui bahan bacaan seorang pendidik harus memiliki pemahaman terbaru tentang kondisi politik dan isu-isu kebangsaan. Selain itu seorang guru harus memahami peta politik dan tidak memperlihatkan keterpihakannya pada salah satu blok. Hal ini penting mengingat siswa sekolah

menengah atas dengan karakter siswa yang sudah dewasa, kritis dan sebagian sudah masuk dalam pemilih pemula.

Karakteristik siswa sekolah menengah atas sebagian sudah masuk kedalam warga negara muda yang sudah dapat menggunakan hak pilihnya. Dalam pemilihan umum, International IDEA (2015) menyatakan bahwa pemilihan umum berkala memberi warga sarana untuk menggantikan petahana dan mengubah pemerintahan. Dengan hak pilihnya maka siswa sudah mampu menunjukkan pemikiran kritis. Pemikiran kritis tersebut dapat diuji melalui ruang kelas dengan menampilkan isu-isu global yang memanas di masyarakat. Cara siswa mengajukan argumen secara kritis perlu dibangun di ruang kelas. Hal ini perlu dilakukan karena diperlukan ketajaman kritis dalam menganalisis situasi untuk menentukan sikap berpolitik. Hal ini sesuai dengan pendapat Habermas yang dikutip oleh Hardiman (2008). Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan pembelajaran yang lebih menarik dan konten materi yang disesuaikan dengan isu global.

Konten materi pendidikan politik harus disesuaikan dengan isu global terutama yang berkaitan dengan negara Indonesia. Affandi & Suryadi (2015) menyatakan bahwa pendidikan politik haruslah dilakukan secara konkret dalam masyarakat. Dalam pendidikan politik perlu memasukan isu-isu kontemporer diantaranya yaitu demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Konten materi pendidikan politik ini dapat diinternalisasi melalui 2 media di sekolah. Yang pertama melalui pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan media yang kedua yaitu melalui kegiatan organisasi di sekolah bisa melalui OSIS, Kepramukaan dan organisasi lainnya. Staeheli & Hammett (2010) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan digunakan dalam upaya untuk menciptakan warga negara jenis tertentu sebagai bagian dari upaya yang lebih besar di pembangunan bangsa dan negara. Melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pendidikan politik dilakukan dengan paparan masalah (*problem exposure*) tentang isu-isu global. Isu-isu global tentang fenomena politik disajikan secara kritis dengan gaya penyampaian siswa SMA. Kemudian Freire (2008) menyatakan bahwa pendidik berperan sebagai mediator dan fasilitator, bukan lagi sebagai sumber pengetahuan. Siswa dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber dengan bimbingan guru. Selain itu siswa juga dapat mengkritisi pendapat yang dikemukakan oleh guru

Media yang kedua dalam pendidikan politik pada siswa SMA yaitu melalui organisasi. Sebagai penyalur hal tersebut dalam penelitian Çakmaklı (2015) tentang partisipasi dalam organisasi masyarakat sipil (CSO) di Turki yang memungkinkan pembelajaran kewarganegaraan aktif, mengungkapkan bahwa sumbu kewarganegaraan aktif pertama mencakup dimensi pendefinisian (aksi sipil, kohesi, aktualisasi diri), sedangkan sumbu kedua mencakup jenis pembelajaran yang dibutuhkan oleh warga negara yang aktif (kognitif, pragmatis, afektif). Kemudian dalam hal organisasi pendidikan politik pada siswa SMA, organisasi yang dapat diikuti oleh siswa SMA antara lain Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Kepramukaan dan organisasi lain. Melalui organisasi siswa belajar menyampaikan argumen, bersosialisasi, komunikasi sesuai dengan sudut pandang yang berbeda dan tanggung jawab. Melalui organisasi kepribadian politik peserta didik semakin terasah. Hal ini terjadi karena peserta didik perlu mengetahui, menganalisis dan memahami isu-isu global yang ada di masyarakat. Dengan

memahami isu-isu tersebut siswa dapat menentukan sudut pandang dan menentukan tindakan apa yang akan diambil.

## KESIMPULAN

Pendidikan politik merupakan upaya yang sistematis dan keberlanjutan. Gagasan mengenai konsep pendidikan politik bagi warga negara muda dalam konteks Indonesia merupakan usaha dalam menjawab tantangan tentang keapatisan warga negara muda terhadap politik. Berdasarkan penelitian kepustakaan yang telah peneliti lakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa konsep pendidikan politik bagi warga negara muda dalam konteks Indonesia adalah : 1) pendidikan politik bagi warga negara muda dalam konteks Indonesia harus memperhatikan beberapa dimensi pendidikan politik yaitu kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan politik. Afektif yang berhubungan dengan pembentukan karakter dan aspek psikomotor yang berhubungan dengan kecakapan baik berupa intelektual maupun partisipatoris. 2) Konten pendidikan politik dalam konteks Indonesia adalah demokrasi, budaya politik Pancasila dan isu global.

## SARAN

Pengambil kebijakan direktorat Pendidikan Tinggi, terutama pada pihak pengembang kurikulum pendidikan politik dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan masih terbatas, sehingga diperlukan materi tentang pendidikan politik agar menunjang pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai politik di Indonesia. Peneliti selanjutnya, diperlukan kajian tentang model pendidikan politik bagi generasi muda terutama pada semua jenjang pendidikan karena penelitian ini berfokus pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

## DAFTAR RUJUKAN

- (International IDEA). (2015). *Youth Voter Participation*. Stockholm: (International IDEA). Diambil dari <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/youth-voter-participation.PDF>
- Abdul Mu'iz, U. (2000). *Tarbiyah Siyasah Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Inter media.
- Affandi, I., & Suryadi, K. (2015). Teori dan Konsep dalam Konteks Pendidikan Politik. Diambil dari <http://repository.ut.ac.id/4009/1/PKNI4423-M1.pdf>
- Arma, A., & Agus., M. (1994). *Dasar-Dasar Pendidikan Jasmani*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Aydin, H., Ozfidan, B., & Carothers, D. (2017). Meeting the Challenges of Curriculum and Instruction in School Settings in the United States. *Journal of Social Studies Education Research*.
- Bilgiler, S., Politik, S., Öğretimi, K., kuş, Z., & Tarhan, Ö. (2016). POLITICAL EDUCATION IN SOCIAL STUDIES CLASSROOMS: A PERSPECTIVE FROM TURKEY, 2016, 464–483.
- Bronson, M. S. (1999). *Belajar Civic Education Dari Amerika*. Yogyakarta: LKiS.
- Budimansyah, D., & Suryadi, K. (2008). *PKN dan Masyarakat Multikultural*.

- Bandung: Program Studi Pendidikan. Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Çakmaklı, D. (2015). Active citizenship in Turkey: learning citizenship in civil society organizations. *Citizenship Studies*, 19(3–4), 421–435. <https://doi.org/10.1080/13621025.2015.1006174>
- de Vries, J. (1994). The Industrial Revolution and the Industrious Revolution. *The Journal of Economic History*, 54(2), 249–270. <https://doi.org/DOI:10.1017/S0022050700014467>
- Eriyanto. (2008). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Ferris, G., Treadway, D., Perrewé, P., Brouer, R., Douglas, C., & Lux, S. (2007). Political Skill in Organizations. *Journal of Management*, 33, 290–320. <https://doi.org/10.1177/0149206307300813>
- Freire, P. (2008). *Pendidikan Masyarakat Kota*. Yogyakarta: Lkis,.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Prakti*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadi, S. (1995). *Metodologi Research Jilid IV*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Halking. (2018). Aspek-aspek Pendidikan Politik dalam Kehidupan Demokrasi untuk Mewujudkan Kecakapan Warga Negara yang Smart and Good Citizenship. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>  
<http://fh.unnes.ac.id>, 4(3), 1205–1228.
- Hardiman, F. B. (2008). Teori Diskursus dan Demokrasi: Peralihan Habermas ke dalam Filsafat Politik, dalam: Diskursus. *Jurnal Filsafat dan Teologi*, 5(1).
- Hartney, M. T., & Flavin, P. (2013). The Political Foundations of the Black–White Education Achievement Gap. *American Politics Research*, 42(1), 3–33. <https://doi.org/10.1177/1532673X13482967>
- Hidayah, Y., Suyitno, & Retnasari, L. (2019). Analisis Kemampuan Resolusi Konflik Siswa Sekolah Dasar. (*JKPD*) *Jurnal Kajian Pendidikan Dasar*, 4(1).
- Hudha, M. N., Triwahyuningtyas, D., Rafikayati, A., Fajaruddin, S., Maryani, I., Widiaty, I., ... Permanasari, A. (2019). How is STEM learning for children with special needs in Indonesia? In *4th Annual Applied Science and Engineering Conference*. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1402/4/044104>
- Hysing, E. (2015). Citizen participation or representative government – Building legitimacy for the Gothenburg congestion tax. *Transport Policy*, 39, 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2015.01.002>
- Karaduman, İ. (2014). Global Challenges For The World.
- Karliani, E., Kartadinata, S., Winataputra, U. S., & Komalasari, K. (2019). Indonesian civic engagement among college students. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 29(5), 582–592. <https://doi.org/10.1080/10911359.2019.1571980>
- Kleinberg, M., & Lau, R. (2019). The Importance of Political Knowledge for Effective Citizenship. *Public Opinion Quarterly*, 83, 338–362. <https://doi.org/10.1093/poq/nfz025>
- König, P. D., & Wenzelburger, G. (2020). Opportunity for renewal or disruptive force? How artificial intelligence alters democratic politics. *Government Information Quarterly*, 37(3), 101489. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101489>

- Kovacs, P. (2009). Education for Democracy: It Is Not an Issue of Dare; It Is an Issue of Can. *Teacher Education Quarterly*. Diambil dari <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ851024.pdf>
- Lee, S., & Xenos, M. (2019). Social distraction? Social media use and political knowledge in two U.S. Presidential elections. *Computers in Human Behavior*, *90*, 18–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.08.006>
- Leonhard, L., Karnowski, V., & Kümpel, A. S. (2020). Online and (the feeling of being) informed: Online news usage patterns and their relation to subjective and objective political knowledge. *Computers in Human Behavior*, *103*, 181–189. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.08.008>
- Maemonah. (2012). Aspek-aspek dalam pendidikan karakter. *FORUM TARBIYAH*, *10*(1).
- Malihah, E. (2015). An ideal Indonesian in an increasingly competitive world: Personal character and values required to realise a projected 2045 ‘Golden Indonesia.’ *Citizenship, Social and Economics Education*, *14*(2), 148–156. <https://doi.org/10.1177/2047173415597143>
- Marsudi, S. Al. (2006). *Pancasila dan UUD’45 Dalam Paradigma Reformasi*. Yogyakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mcdougald, J. (2018). CLIL across the Curriculum, benefits that go beyond the classroom. *Latin American Journal of Content & Language Integrated Learning*, *11*, 9–18. <https://doi.org/10.5294/laclil.2018.11.1.1>
- McMahon, W. (2004). The social and external benefits of education. *International Handbook on the Economics of Education*, 211–259. <https://doi.org/10.4337/9781845421694.00011>
- Memoli, V. (2011). How Does Political Knowledge Shape Support for Democracy? Some Research Based on the Italian Case. *Bulletin of Italian Politics*, *3*(1). Diambil dari [https://www.gla.ac.uk/media/Media\\_210769\\_smxx.pdf](https://www.gla.ac.uk/media/Media_210769_smxx.pdf)
- Michels, A., & Graaf, L. De. (2010). Examining Citizen Participation: Local Participatory Policy Making and Democracy. *Local Government Studies*, *36*(4). <https://doi.org/10.1080/03003930.2010.494101>
- Mirshak, N. (2019). Education as Resistance: Egyptian Civil Society and Rethinking Political Education Under Authoritarian Contexts. *Critical Sociology*, 0896920519856398. <https://doi.org/10.1177/0896920519856398>
- Moleong., L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Molokwane, T., & muhiya tshombe, L. (2018). *Citizen Involvement in the Formulation of Public Policy*.
- Munyon, T., Summers, J., Thompson, T., & Ferris, G. (2013). Political Skill and Work Outcomes: A Theoretical Extension, Meta-Analytic Investigation, and Agenda for the Future. *Personnel Psychology*, *68*. <https://doi.org/10.1111/peps.12066>
- Nilgun, D., Mehmet, A. S., & Burcu, S. (2015). Political education in school. *Educational Research and Reviews*. <https://doi.org/10.5897/err2015.2330>
- Nurkholis. (2013). Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi. *Jurnal Kependidikan*, *1*(1), 24–44.
- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2018). *The*

- future of education and skills Education 2030*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Pacho, T. (2014). Necessity Of Political Education. *international journal of innovative research & studies*, 3, 10–17.
- Pastarmadzhieva, D. (2015). Political knowledge: Theoretical formulations and practical implementation, 13, 16–21. <https://doi.org/10.15547/tjs.2015.s.01.004>
- Peterson, A. (2019). Character education, the individual and the political. *Journal of Moral Education*, 1–15. <https://doi.org/10.1080/03057240.2019.1653270>
- Print, M. (2012). teacher pedagogy and achieving citizenship competences in schools. In M. P. and D. Lang (Ed.), *schools, curriculum an civic educaton for building democratic citizens* (hal. 113). sense publisher.
- Quintelier, E. (2010). The effect of schools on political participation: A multilevel logistic analysis. *Research Papers in Education*, 25, 137–154. <https://doi.org/10.1080/02671520802524810>
- Raharjo. (2017). Penguatan Civic Literacy Dalam Pembentukan Warga Negara Yang Baik (Good Citizen) Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Warga Negara Muda (Studi Tentang Peran Pemuda HMP PPKn Demokrata Pada Dusun Binaan Mutiara Ilmu Di Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(2), 175–198.
- Romadlon, S. G. (2016). Implikasi Pergeseran Sistem Politik terhadap Hukum dan Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(4). Diambil dari <https://media.neliti.com/media/publications/113635-ID-implikasi-pergeseran-sistem-politik-terh.pdf>
- Ruger, J. (2005). Democracy and health. *QJM : monthly journal of the Association of Physicians*, 98, 299–304. <https://doi.org/10.1093/qjmed/hci042>
- Setiawan, M., & Darmawan, C. (2020). A Model of Community Defending Public Awareness Development in the Bandung City. In *Proceedings of the 6th International Conference of Project Management (ICPM) Malang 2020*. Malang. <https://doi.org/10.32535/jicp.v2i4.792>
- Soejono, & Abdurrahman. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapannya*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Somantri, M. N. (2001). *Menggagas pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- St. John-Matthews, J., Robinson, L., Martin, F., Newton, P. M., & Grant, A. J. (2020). Crowdsourcing: A novel tool to elicit the student voice in the curriculum design process for an undergraduate diagnostic radiography degree programme. *Radiography*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.radi.2020.04.019>
- Staheli, L. A., & Hammett, D. (2010). Educating the new national citizen: education, political subjectivity and divided societies. *Citizenship Studies*, 14(6), 667–680. <https://doi.org/10.1080/13621025.2010.522353>
- Stringer, M., Irwing, P., Giles, M., Mcclenahan, C., Wilson, R., & Hunter, J. (2009). Parental and school effects on children’s political attitudes in Northern Ireland. *The British journal of educational psychology*, 80, 223–240. <https://doi.org/10.1348/000709909X477233>
- Surachman, W. (1990). *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*.

Bandung: Tarsita.

- Tausan, L. (2013). "Education For All "A Dimension of Education in the 3rd Millennium. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: CVAlfabeta.
- Walker, Z. (2016). Special Education Teacher Preparation in Singapore ' s Dual Education System. *Teacher Education and Special Education*, 39(3), 178–1190. <https://doi.org/10.1177/0888406415622251>
- Wang, M. Z., & Hall, J. A. (2019). Political skill and outcomes in social life. *Personality and Individual Differences*, 149, 192–199. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.05.010>
- Witschge, J., Rözer, J., & Werfhorst, H. G. van de. (2019). Type of education and civic and political attitudes. *British Educational Research Journal*, 45(2), 298–319. <https://doi.org/10.1002/berj.3501>
- Wu, J. (2017). Political institutions and the evolution of character traits. *Games and Economic Behavior*, 106, 260–276. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.geb.2017.10.011>
- Zavala, M., & Henning, N. (2017). The Role of Political Education in the Formation of Teachers as Community Organizers: Lessons From a Grassroots Activist Organization. *Urban Education*, 0042085917727574. <https://doi.org/10.1177/0042085917727574>
- Zvulun, J. Y., & Harel, Y. (2018). Elections as an Opportunity of learning Civic Education and Political Participation for teenagers. *Citizenship, Social and Economics Education*, 17(2), 136–147. <https://doi.org/10.1177/2047173418768548>
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional